

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amran, Rusli, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, Sinar Harapan, Jakarta : 1981.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta : 2005.
- Dobin, Christine, *GEJOLAK EKONOMI, KEBANGKITAN ISLAM DAN GERAKAN PADRI: Minangkabau 1784-1847*, Komunitas Bambu, 1992.
- , *KEBANGKITAN ISLAM DALAM EKONOMI PETANI YANG SEDANG BERUBAH: Sumatera Tengah 1784-1847*, INIS, Jakarta : 1992.
- Hadjon, Philips M., *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Penelitian Methode Penelitian Hukum Normatif, Universitas Airlangga, Surabaya : 1997.
- Hakimy, Idrus, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung : 1997.
- Huda, Ni'matul, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta : 2007.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, Ratu Grafika, Padang : 2000.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta : 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta : 2005.
- Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Resarch, In A Nutshell*, West Group, ST. Paul, Minn, United States of America : 2000.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004.
- Navis, Ali Akbar, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta, PT. Pustaka Grafikapers : 1986.

- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta : 2012.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007.
- Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Australia : 2002.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 1991.
- Zenwen Pador, dkk, *KEMBALI KENAGARI: Batuka Baruak Jo Cigak?*, PT. Sinar Grafika, Jakarta : 2002.
- Gaffar, Affan, 2001, *Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya, Dalam Pemulihan Ekonomi dan Otonomi Daerah: Refleksi Pemikiran Partai Golkar*, LASPI, Jakarta.
- Widjaja, A.W. 1993, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Heroepoetri, Arimbi, 2000, *Mencari Untung Daripada Buntung*, E-Law Indonesia, Jakarta.
- Sangguno Dirajo, Datuk, 1987, *Curaian Adat Alam Minangkabau*, Cetakan I, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
- Toeah, Datoek, 1985, *Tambo Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
- International IDEA, 2000, *Penilaian Demokratisasi Di Indonesia*, Forum Untuk Reformasi Demokratis.
- Westenenk, LC. 1918, *De Minangkabausche Nagari*, Terjemahan Mahyudin Saleh, SH, Penerbit Bursa Buku Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Nasroen, M. 1957, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Djakarta.
- Rasjid Manggis, M. 1971, *Minangkabau Sedjarah Ringkas dan Adatnja*, Penerbit Sridharma, Padang.
- S.W. Sumardjono, Maria, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian; Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Effendi, Nusyirwan, 2001, *Status dan Penegelolaan Harta Benda dan Kekayaan Nagari (HBKN)*, Makalah Diskusi Panel, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Andalas, Padang.

AM, Sjahmunur, 2001, *Pemerintahan Nagari Dan Desa serta Perkembangannya Di Sumatera Barat* (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata Adat pada Fakultas Hukum Universitas Andalas), Padang.

-----, 2001, *Aset Nagari Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Padang.

Thalib, Sjojfan, 1996, *Hukum Adat Perkawinan Minangkabau Setelah Berlakunya Hukum Perkawinan Nasional* (Disertasi pada Universitas Gadjah Mada), Yogyakarta.

Ali Muntolo, Sudarmo, dkk, 1996, *Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pertanian Salak Pondoh Desa Bangunkerto)*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai- Tradisional Bagian Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.

### **Per-Undang-Undangan**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; Serta Pemimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan Dan Penghapusan Desa Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 155/GSB/1974 tentang Kerapatan Nagari Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 102/GSB/1985 tentang Pemanfaatan Harta Kekayaan Nagari Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 103/GSB/1985 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Nagari Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

### **Kaya Ilmiah**

Alfitri, *Kepemimpinan dan Struktur Kekuasaan Lokal Dalam Perkembangan*, 1992, Tesis MS Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Virza Benzani, 1991, *Tinjauan Yuridis Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau Sumatera Barat dan Perkembangannya Dewasa Ini*

*Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional, Reporsitori Skripsi S1  
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor.*

**Media Massa**

Harian Haluan.

Harian Padang Ekspres.

Tabloid Suara Rakyat Nomor 1 Tahun I, Desember 2000.

**Website**

[http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/19/12/818607/pengesahan-uu-  
desa-tonggak-sejarah-indonesia](http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/19/12/818607/pengesahan-uu-<br/>desa-tonggak-sejarah-indonesia)

<http://www.satjiptorahardjoinstitute.org/artikel/dilema-legal-pluralisme-desa/>

